

FAKTOR EKONOMI MAKRO TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA PADA TAHUN 2009-2023

Oleh:

¹Purwoko Adhi Pramono, ²Siti Aisyah

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartosuro Telp. (0271) 717417 Surakarta, 57102

e-mail : puerwokjo@gmail.com¹, sa150.ums.ac.id²

ABSTRACT

Economic expansion functions as a critical metric that signifies the financial vitality of a nation. In addition to the impediments presented by residual budget financing (SiLPA), technological innovation, corruption, taxation, and educated unemployment, numerous other barriers obstruct Indonesia's economic advancement. This research endeavors to explore the diverse elements that impact economic growth. The analysis employed secondary data spanning from 2009 to 2023, obtained from the Central Statistical Agency (BPS), the Central Government Financial Report (LKPP), and the Corruption Eradication Commission (KPK). The approach utilized is the Ordinary Least Squares regression methodology (OLS). The results indicated that, while the variables of corruption and educated unemployment did not exhibit significant effects on economic growth, the factors of SiLPA, technological innovation, and taxation demonstrated substantial impacts. It is anticipated that the government will proficiently manage SiLPA to enhance infrastructure development and public services, along with optimizing the taxation framework.

Keywords: *Excess Budget Financing (SiLPA), Technological Advancement, Corruption, Taxation, And Educated Unemployment*

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai metrik penting yang merangkum vitalitas ekonomi suatu bangsa. Selain tantangan yang terkait dengan pembiayaan sisa anggaran (SiLPA), kemajuan teknologi, korupsi, perpajakan, dan pengangguran berpendidikan, banyak hambatan lain menghalangi kemajuan ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki beragam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Analisis ini menggunakan data sekunder dari 2009 hingga 2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Metodologi yang digunakan adalah teknik regresi kuadrat terkecil biasa (OLS). Hasilnya menunjukkan bahwa, sementara variabel korupsi dan pengangguran berpendidikan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi, unsur-unsur SiLPA, kemajuan teknologi, dan perpajakan menunjukkan efek substansial. Diharapkan pemerintah akan mengelola SiLPA secara efektif untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, selain mengoptimalkan proses perpajakan.

Kata Kunci: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Kemajuan Teknologi, Korupsi, Pajak, Pengangguran Terdidik.

PENDAHULUAN

Kapasitas dan kemandirian kemajuan ekonomi berfungsi sebagai metrik keberhasilan suatu negara. Tujuan pembangunan negara adalah untuk mendorong kesejahteraan publik yang adil dan berkelanjutan melalui proses yang direncanakan secara sistematis dan dilaksanakan secara progresif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Hazmi, 2024). Peningkatan dalam kondisi ekonomi suatu negara selama jangka waktu tertentu disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Suatu ekonomi dapat dianggap berkembang ketika ada peningkatan kegiatan ekonomi relatif terhadap tahun sebelumnya (Nugroho & Aisyah, 2022). Negara-negara maju dinilai berdasarkan ketahanan ekonomi mereka, dengan Bank Dunia memanfaatkan pertumbuhan ekonomi sebagai kriteria utama untuk membedakan antara negara maju dan berkembang. Subjek ini telah mengumpulkan perhatian ilmiah yang substansif secara global. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi karena konsekuensinya yang luas yang meliputi hampir semua sektor. Pertumbuhan ekonomi secara khusus dicirikan sebagai peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan nasional bruto, dan kemampuan produktif suatu bangsa (Hasnah & Aisyah, 2025).

Hambatan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara, menghalangi kemajuan ekonomi dan mengganggu tatanan masyarakat, sehingga menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya. Transparency International (TI) telah menilai tingkat korupsi melalui Indeks Persepsi Korupsi (CPI) sejak tahun 1996. Menurut data TI 2023, Indonesia memiliki skor CPI rata-rata 43. CPI beroperasi pada skala dari 0 hingga 100, di mana skor 0 menandakan kehadiran korupsi yang meluas, sedangkan skor 100 menunjukkan negara bebas dari korupsi (Damanik & Saragih, 2023).

Penentu lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah realisasi defisit anggaran, yang pada tahun 2022 hanya 2,35 persen dari PDB aktual, kurang dari target yang ditetapkan dalam Pers No. 98 tahun 2022, yaitu 4,50 persen dari PDB. Keadaan ini mengakibatkan tingginya *Resting Over Budget Financing* (SiLPA) pada tahun 2022, sehingga meningkatkan likuiditas dana yang dikelola pemerintah (APBN, 2023). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, SiLPA menandakan surplus dana yang dihasilkan dari aktualisasi penerimaan dan pengeluaran APBD dalam satu periode. Selama lima tahun terakhir, tingkat penyerapan SiLPA secara konsisten melebihi 100%, menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah secara efektif mengalokasikan surplus pembiayaan anggaran untuk investasi produktif dan inisiatif pembangunan, yang menjadi pertanda baik bagi pertumbuhan ekonomi bangsa (Martkliana & Hariani, 2024).

Dalam kerangka penyelidikan ini, kemajuan teknologi muncul sebagai katalis untuk pembangunan ekonomi, karena kemajuan teknologi adalah karakteristik mendasar dari era digital kontemporer, dengan evolusinya selaras dengan pergeseran paradigma sosial, seperti yang disarankan oleh Zhou et al. (2021). Teknologi berfungsi sebagai manifestasi nyata dari kemajuan ilmiah, dengan inovasi yang dihasilkannya berpotensi menghasilkan efek menguntungkan pada keberadaan manusia. Selama dekade terakhir, masyarakat telah menuai manfaat dari inovasi teknologi yang berasal dari kegiatan ekonomi (Setiawati & Al Qoodir, 2021). Evolusi pesat ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki kapasitas untuk mempercepat proses perkembangan; ketergantungan tradisional pada tenaga kerja manusia semakin beralih ke penggunaan mesin canggih, sehingga meningkatkan kualitas, efisiensi, dan produktivitas dalam inisiatif pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya mengarah pada laju percepatan pertumbuhan ekonomi (Maulana & Bowo, 2013). Aspirasi negara-

negara berkembang untuk meningkatkan ekonomi mereka sering bergantung pada perolehan keahlian teknologi. Akibatnya, pemangku kepentingan yang terlibat dalam kemajuan teknologi harus menumbuhkan kapasitas untuk mengasimilasi, mempertahankan, dan menguasai pengetahuan teknologi (Setyowati Eni, 2001). Inovasi teknologi teladan yang menargetkan pembangunan ekonomi adalah fintech (teknologi keuangan), yang didefinisikan sebagai aplikasi berbasis teknologi yang telah mendapatkan penerimaan luas di Indonesia, yang bertujuan mempromosikan transaksi ekonomi tanpa uang tunai. Fintech meningkatkan keamanan transaksi dengan menawarkan kerangka kerja yang lebih aman dan lebih efisien, memungkinkan pencatatan otomatis melalui sistem yang mengurangi risiko yang terkait dengan penipuan atau penyalahgunaan (Khotiawan, Sakti, et al., 2023).

Sebagian besar pendapatan negara berasal dari perpajakan; dengan demikian, pajak merupakan elemen penting dari pendapatan pemerintah yang penting untuk memenuhi persyaratan Anggaran Negara. Peningkatan pendapatan pajak memberdayakan pemerintah untuk menambah pengeluaran dan menyegarkan kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti dicatat oleh Pratama & Widystuti (2022). Reformasi perpajakan daerah di Indonesia telah berlangsung selama kurang lebih dua dekade dan telah berlangsung dalam tiga tahap yang berbeda. Tahap awal dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah. Tahap kedua dimulai melalui amandemen yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Tahap terakhir ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah. Tujuan dari reformasi perpajakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam domain perpajakan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2018).

Pembangunan yang efektif tidak hanya mencakup kemajuan ekonomi tetapi juga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Budidaya SDM dapat difasilitasi melalui akses ke pendidikan berkualitas tinggi, yang merupakan elemen penting dalam membina individu dengan karakter dan kepribadian yang kuat (Setyanti & Finuliyah, 2022). Pendidikan memiliki kapasitas untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang dilengkapi dengan pola pikir dan perilaku inovatif (Searle, 2023). Individu yang memiliki kredensi pendidikan tinggi diberikan prospek pekerjaan yang lebih besar di sektor formal dibandingkan dengan mereka yang memiliki pencapaian pendidikan yang lebih rendah. Namun demikian, statistik kontemporer di Indonesia mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran sebagian besar tinggi di antara individu dengan kualifikasi pendidikan tinggi. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, angka pengangguran berpendidikan di Indonesia diproyeksikan melebihi 8 juta. Kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi termasuk lulusan dari sekolah dasar, SMP, SMA, lembaga kejuruan, dan universitas, sebagaimana dicatat oleh Alharis & Yuniasih (2022). Lebih dari 800.000 lulusan universitas menggambarkan bahwa tantangan pengangguran tidak terbatas pada mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih rendah; lulusan perguruan tinggi juga menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengamankan pekerjaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penyelidikan sebelumnya, unsur-unsur yang mencakup kemajuan teknologi dan prevalensi korupsi belum diteliti secara mendalam, dan SiLPa telah dianalisis terutama

pada lingkup regional daripada nasional. Inovasi teknologi memiliki kapasitas untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen anggaran lokal, sedangkan korupsi dapat menghambat alokasi pengeluaran modal dan sumber daya yang efektif (Liu & Shuwen, 2022). Selain itu, pajak, yang merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, belum dieksplorasi secara menyeluruh dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi (Ofori et al., 2022). Tingkat pengangguran berpendidikan yang signifikan dapat menandakan keterputusan antara pengembangan sumber daya manusia dan permintaan tenaga kerja pasar (Klein, 2015).

Penyelidikan oleh Nur Rahmawati dkk. (2024) menyelidiki dampak SiLPA, dalam kaitannya dengan pajak daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK), terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Temuan menunjukkan bahwa SiLPA memberikan efek merugikan pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan pajak daerah dan DAK menunjukkan pengaruh positif. Namun, penelitian ini menganalisis tiga variabel tanpa memperhitungkan faktor-faktor tambahan seperti kemajuan teknologi, korupsi, dan pengangguran berpendidikan. Temuan yang berasal dari satu wilayah mungkin tidak berlaku untuk wilayah lain yang ditandai dengan kondisi ekonomi yang berbeda.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Febriana & Praptoyo (2015), diteliti faktor-faktor penentu yang mempengaruhi belanja modal di Jawa Timur, antara lain SiLPA, PAD, DAU, dan DAK. Hasilnya mengungkapkan bahwa SiLPA dan DAK tidak mempengaruhi pengeluaran modal, sementara PAD dan DAU menunjukkan pengaruh yang signifikan. Wawasan dari penelitian ini dapat berkontribusi untuk memahami pemanfaatan anggaran daerah. Simamora (2014) mengeksplorasi korelasi antara SiLPA, pendapatan, dan pengeluaran pembiayaan dalam kaitannya dengan pengeluaran daerah. Studi ini menunjukkan dampak SiLPA pada pengeluaran regional pada periode berikutnya; Namun, itu mengabaikan variabel pajak, pengangguran terdidik, dan kemajuan teknologi, yang berpotensi memoderasi hubungan antara alokasi anggaran dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, ada kesenjangan penelitian mengenai pemanfaatan efisiensi pengelolaan anggaran dan pengeluaran daerah untuk secara langsung merangsang pertumbuhan ekonomi. Karya Febriana & Praptoyo (2015) memberikan perspektif berharga tentang interaksi antara anggaran daerah dan pertumbuhan ekonomi tetapi menyoroti kesenjangan penelitian, karena saat ini tidak ada studi yang mengintegrasikan SiLPA, kemajuan teknologi, korupsi, pajak, dan pengangguran terdidik dalam kerangka analisis yang kohesif. Mengingat fokus yang luas pada analisis regional, penyelidikan lebih lanjut diperlukan.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari BPS, laporan keuangan direktorat jenderal pajak dan komisi pemberantasan korupsi dari tahun 2009-2023. Metode untuk menganalisis Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Kemajuan Teknologi, Korupsi, Pajak, Dan Pengangguran Terdidik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi digunakan alat analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS)

Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu variabel *independen* berupa SiLPA yang diukur dari sisa lebih pembiayaan anggaran, kemajuan teknologi yang diukur dari banyaknya pengguna internet, korupsi yang diukur dari kasus tindak pidana korupsi yang di eksekusi, pajak yang diukur dari penerimaan pajak, dan Pengangguran terdidik yang diukur dengan cara seseorang menamatkan pendidikan dari sekolah dasar hingga universitas. Variabel *dependen* berupa pertumbuhan ekonomi yang diukur dari PDB. Maka diperoleh model ekonometrika sebagai berikut:

$$PDB_t = \beta_0 + \beta_1 SILPA_t + \beta_2 JPI_t - \beta_3 KRPS_t + \beta_4 PJK_t - \beta_5 PT_t + \varepsilon_t$$

Keterangan:

PDB_t : Produk Domestik Bruto pada periode ke t (Rupiah)

$SILPA_t$: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada periode ke t (Rupiah)

JPI_t : Jumlah Pengguna Internet pada periode ke t (Jiwa)

$KRPS_t$: Korupsi pada periode ke t (kasus)

PJK_t : Pajak pada periode ke t (Rupiah)

PT_t : Pengangguran Terdidik pada periode ke t (Jiwa)

ε_t : eror term pada periode ke t

β_0 : Konstanta

β_1 - β_5 : Nilai koefisien masing masing *Variabel Independen*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan data seri temporal yang mencakup dari 2004 hingga 2023, yang akan diilustrasikan pada Tabel 1. Analisis ini akan mencakup lima evaluasi asumsi fundamental, khususnya penilaian multikolinearitas, normalitas pemeriksaan residu, analisis autokorelasi, evaluasi heteroskedastisitas, dan spesifikasi model atau penilaian linearitas.

Tabel 1
Hasil Estimasi

$\log PDB_t = 10,38374 + 0,0205 \log SILPA_t + 0,3226 \log JPI_t - 0,0002 KRPS_t$			
	(0,053)***	(0,000)*	(0,702)
$+ 0,5877 \log PJK_t - 0,0240 \log PT_t$			
	(0,000)*	(0,661)	
$R^2 = 0,996$; DW-Stat. = 1,879; F-Stat. = 912,217; Prob. F-Stat. = 0,000			

Uji Diagnosis

(1) Multikolinieritas (VIF)

$\log SILPA = 2,095$; $\log JPI = 35,4793$; $KRPS = 4,210$; $\log JPK = 28,373$; $\log PT = 1,069$

(2) Normalitas Residual

$JB(2) = 1,421$; Prob. $JB(2) = 0,491$

(3) Otokorelasi

$\chi^2(3) = 2,808$; Prob. $\chi^2(3) = 0,422$

(4) Heteroskedastisitas

$\chi^2(8) = 8,265$. $\chi^2(8) = 0,507$

(5) Linieritas

$F(1,13) = 0,977$; Prob. $F(1,13) = 0,340$

Sumber: hasil olah data E-Views

Keterangan: * Signifikan pada $\alpha = 0,01$; ** Signifikan pada $\alpha = 0,05$; *** Signifikan pada $\alpha = 0,10$. Angka dalam kurung adalah probabilitas empirik (*p value*) t-statistik.

Penilaian untuk multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan uji Variance Inflation Factor (VIF). Dalam pengujian ini, model yang diperkirakan dianggap menghadapi masalah multikolinearitas jika salah satu variabel independennya menunjukkan nilai VIF melebihi 10. Hasil tes VIF disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji VIF

Variabel	VIF	Kriteria	Kesimpulan
<i>LogSILPA</i>	2,0955	< 10	Tidak ada multikolineritas
<i>LogJPI</i>	35,4793	> 10	Multikolineritas
<i>KRPS</i>	4,2107	< 10	Tidak ada multikolineritas
<i>LogPJK</i>	28,3735	> 10	Multikolineritas
<i>LogPT</i>	1,0696	< 10	Tidak ada multikolineritas

Penilaian normalitas residual dalam kaitannya dengan estimasi model akan dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera (JB). Hipotesis nol (H_0) yang terkait dengan uji JB menyatakan bahwa distribusi residu sesuai dengan normalitas, sedangkan hipotesis alternatif (H_A) berpendapat bahwa distribusi ini menyimpang dari normalitas. Hipotesis nol dipertahankan jika nilai-p, probabilitas, atau signifikansi statistik empiris yang terkait dengan JB melebihi ambang signifikansi (α); sebaliknya, dianggap ditolak jika nilai-p, probabilitas, atau signifikansi statistik empiris kurang dari atau sama dengan α . Seperti yang diilustrasikan pada Tabel 1, nilai-p, probabilitas, atau signifikansi statistik empiris yang sesuai dengan uji JB ditetapkan pada 0,491 ($> 0,10$); oleh karena itu, H_0 diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa distribusi residu untuk model yang diperkirakan selaras dengan premis normalitas.

Pemeriksaan autokorelasi akan dilakukan melalui uji Breusch-Godfrey (BG). Hipotesis nol (H_0) untuk uji BG menegaskan tidak adanya autokorelasi dalam model yang diperkirakan, sedangkan hipotesis alternatif (H_A) menegaskan adanya autokorelasi. Hipotesis nol dipertahankan ketika nilai-p, probabilitas, atau signifikansi statistik empiris dari uji BG chi-kuadrat melampaui tingkat signifikansi (α); ditolak jika nilai-p, probabilitas, atau signifikansi statistik empiris kurang dari atau sama dengan α . Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1, nilai-p, probabilitas, atau signifikansi statistik empiris untuk uji BG chi-kuadrat dicatat pada 0,0422 ($> 0,01$); dengan demikian, H_0 ditegakkan. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi autokorelasi dalam model yang diperkirakan.

Evaluasi heteroskedastisitas akan dilakukan dengan menggunakan tes Putih. Hipotesis nol (H_0) dari uji White menyatakan bahwa model tersebut tidak memiliki masalah heteroskedastisitas, sedangkan hipotesis alternatif (H_A) menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Hipotesis nol dipertahankan jika nilai-p, probabilitas, atau signifikansi statistik empiris dari uji putih chi-kuadrat melebihi ambang signifikansi (α); ditolak ketika nilai-p, probabilitas, atau signifikansi statistik empiris kurang dari atau sama dengan α . Berdasarkan data yang diberikan pada Tabel 1, nilai-p, probabilitas, atau signifikansi statistik empiris dari uji chi-kuadrat White dicatat pada 0,0507 ($> 0,05$); dengan demikian, H_0 ditegakkan. Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas yang dibuktikan dalam model yang diperkirakan.

Evaluasi spesifikasi model atau linearitas akan diselidiki melalui uji Reset Ramsey. Hipotesis nol (H_0) dari uji Reset Ramsey menegaskan bahwa spesifikasi model benar atau linier, sedangkan hipotesis alternatif (H_A) berpendapat bahwa spesifikasinya salah atau nonlinier. Hipotesis nol dipertahankan jika nilai-p, probabilitas, atau signifikansi statistik empiris dari F-statistik yang diturunkan dari uji Reset Ramsey melebihi tingkat signifikansi (α); ditolak jika nilai-p, probabilitas, atau signifikansi statistik empiris kurang dari atau sama dengan α . Hasil yang disajikan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai-p, probabilitas, atau signifikansi statistik empiris untuk statistik F dari uji RESET Ramsey dicatat pada 0,340 ($> 0,10$); akibatnya, H_0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa spesifikasi model yang diperkirakan memang linier.

Uji Kebaikan Model Uji Eksistensi Model

Evaluasi keberadaan model yang diantisipasi menggunakan uji F. Seperti yang diilustrasikan pada Tabel 1, nilai-p, atau signifikansi empiris statistik F dalam model yang diantisipasi, didokumentasikan pada 0,0000, menunjukkan nilai di bawah 0,01; oleh karena itu, hipotesis nol H_0 diabaikan, menandakan keberadaan model yang diantisipasi.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi sebagai metrik untuk mengevaluasi kemandirian prediktif dari model yang diusulkan. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1, nilai R^2 0,996 menandakan bahwa 99,6% dari variabilitas Pertumbuhan Ekonomi (PDB) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor Residual Over Budget Financing (SILPA), Kemajuan Teknologi (JPI), Korupsi (KRPS), Pajak (CHD), dan Pengangguran Berpendidikan (PT). Sisanya 0,4% dianggap berasal dari variabel atau pengaruh tambahan yang dikeluarkan dari model yang diselidiki.

Uji t

Penilaian validitas mempengaruhi pemeriksaan signifikansi statistik variabel independen secara terpisah. Validasi efek dijalankan menggunakan pendekatan t-test. Hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa $b_i = 0$, menunjukkan bahwa variabel independen i tidak memberikan pengaruh yang berarti; sebaliknya, hipotesis alternatif (H_A) berpendapat bahwa $b_i \neq 0$, menandakan bahwa variabel independen i memang memberikan pengaruh yang signifikan. Hipotesis nol akan ditegakkan jika nilai-p (probabilitas) atau signifikansi statistik empiris t melampaui α ; sebaliknya, hipotesis nol akan ditolak jika nilai-p (probabilitas) atau signifikansi statistik empiris t kurang dari atau sama dengan α .

Tabel 3
Hasil Uji t

Variabel	sig. T	kriteria	Kesimpulan
<i>LogSILPA</i>	0,053	$\leq 0,10$	Berpengaruh signifikan ada $\alpha = 0,10$
<i>LogJPI</i>	0,000	$\leq 0,01$	Berpengaruh signifikan ada $\alpha = 0,01$
<i>KRPS</i>	0.702	$> 0,10$	Tidak Berpengaruh Signifikan
<i>LogPJK</i>	0,000	$\leq 0,01$	Berpengaruh signifikan ada $\alpha = 0,01$
<i>LogPT</i>	0,661	$> 0,10$	Tidak Berpengaruh Signifikan

Uji validitas pengaruh lanjutan menunjukkan bahwa variabel independen yang memberikan dampak signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi (PDB) termasuk Residual Over Budget Financing (SILPA), Kemajuan Teknologi (JPI), dan Pajak (CHD). Sebaliknya, Pengangguran Berpendidikan (PT) dan Korupsi (KRPS) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB).

Variabel SILPA dicirikan oleh koefisien regresi 0,0205. Pola hubungan antara SILPA dan Pertumbuhan Ekonomi adalah logaritmik-logaritmik, menunjukkan bahwa peningkatan SILPA sebesar 1 persen sesuai dengan peningkatan 2,5 persen dalam Pertumbuhan Ekonomi. Sebaliknya, penurunan SILPA sebesar 1 persen menghasilkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,5 persen. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya, seperti Sugiardi & Supadmi (2014), yang menunjukkan bahwa SILPA secara signifikan berdampak pada pengeluaran modal, kemudian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika SILPA dialokasikan secara efektif untuk intervensi di masa depan, itu dapat menghasilkan hasil positif, dibuktikan dengan tingkat penyerapan

melebihi seratus persen, menunjukkan manajemen yang mahir oleh pemerintah (Martkiana & Hariani, 2024).

Variabel Kemajuan Teknologi memiliki koefisien regresi 0,3226. Hubungan antara Kemajuan Teknologi dan Pertumbuhan Ekonomi mengikuti pola logaritmik, menunjukkan bahwa peningkatan 1 persen dalam Kemajuan Teknologi menyebabkan kenaikan 32,26 persen dalam Pertumbuhan Ekonomi. Sebaliknya, penurunan 1 persen dalam Kemajuan Teknologi menghasilkan penurunan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 32,26 persen. Kemajuan Teknologi merupakan bagian integral dari Pertumbuhan Ekonomi, karena teknologi memfasilitasi investasi, perdagangan, dan efisiensi produksi (Setiawati & Al Qoodir, 2021).

Korupsi dianggap tidak signifikan karena tidak secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi; melainkan mempengaruhi efisiensi proses produksi dan salah alokasi sumber daya manusia (Hazmi, 2024). Lim (2003) mengidentifikasi empat faktor yang berkontribusi: Pertama, perilaku penerima suap, yang, meskipun berpotensi meningkatkan pendapatan pribadi, tidak selalu menghambat pertumbuhan ekonomi. Kedua, prediktabilitas korupsi menarik investor, yang cenderung menghindari lingkungan yang tidak pasti dan tidak dapat diprediksi. Ketiga, klientelisme kompetitif, yang ditandai dengan banyak perusahaan yang bersaing untuk sumber daya negara, dianggap lebih efisien daripada praktik monopolistik. Akhirnya, korupsi dapat merampingkan proses birokrasi, memfasilitasi operasi bisnis.

Variabel Pajak memiliki koefisien regresi 0,5877, dengan pola hubungan logaritmik-logaritmik dengan Pertumbuhan Ekonomi. Ini menyiratkan bahwa kenaikan 1 persen dalam Pajak menghasilkan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 58,77 persen, sementara penurunan Pajak 1 persen menyebabkan penurunan Pertumbuhan Ekonomi 58,77 persen. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati & Lathifah (2024), yang menegaskan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penting pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pembangunan dan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan pajak meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, yang, pada gilirannya, mendukung penyediaan barang publik yang merangsang pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Pengangguran berpendidikan tidak memiliki relevansi substansial dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Sesuai penelitian empiris yang dilakukan oleh Batubara et al. (2018), bukti menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran tidak secara inheren menyebabkan penurunan PDB, juga sebaliknya tidak selalu benar. Fenomena ini muncul dari segudang faktor struktural lokal yang mempengaruhi perekonomian. Kegiatan ekonomi kontemporer semakin bergantung pada teknologi canggih, yang mengurangi kebutuhan akan angkatan kerja yang besar sambil tetap berkontribusi positif terhadap PDB, sehingga menunjukkan bahwa pengangguran tidak secara konsisten memberikan dampak signifikan pada PDB (Ashari & Siwi, 2022). Namun demikian, pernyataan ini menyimpang dari kesimpulan yang ditarik oleh Arisusanti (2021), yang menyatakan bahwa pengangguran menghasilkan efek negatif dan signifikan pada PDB, sejalan dengan Hukum Okun; prinsip ini menegaskan bahwa penurunan pengangguran satu persen akan menghasilkan peningkatan PDB dua persen, dan sebaliknya. Selain itu, peningkatan kegiatan ekonomi cenderung meningkatkan produktivitas perusahaan, akibatnya memerlukan tenaga kerja yang terdiri dari individu yang berpendidikan.

PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran

Penelitian ini menemukan bahwa variabel SiLPA, Kemajuan Teknologi, dan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Korupsi dan Pengangguran Terdidik memiliki pengaruh yang tidak signifikan meskipun hal ini sejalan dengan teori ekonomi makro. Penelitian ini mendukung teori makroekonomi klasik dan modern dimana kebijakan fiskal seperti pajak dan SiLPA dapat memacu pertumbuhan ekonomi secara nasional dengan catatan alokasi pajak dan SiLPA digunakan untuk investasi produktif seperti kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi juga memerlukan inovasi teknologi untuk mendorong ekonomi digital dan pada penelitian ini terbukti bahwa inovasi teknologi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya optimalisasi SiLPA ke sektor yang lebih berguna dan berdampak secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pemerintah juga perlu untuk mereformasi perpajakan untuk memperluas penerimaan negara, serta mempercepat transformasi digital dengan cara melakukan inovasi teknologi. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan data yang digunakan, sehingga penelitian berikutnya disarankan melakukan pendekatan yang lebih variatif dengan menambah variabel lain serta cakupan waktu yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alharis, F. A., & Yuniasih, A. F. (2022). Determinan Pengangguran Usia Muda Terdidik di Provinsi Banten Tahun 2020. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 53–62. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1153>
- APBN. (2023). *Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Semester Pertama*. Laporan Pemerintah, 1–3.
- Arisusanti, L. M. (2021). Analisis Pengaruh Investasi, Upah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terdidik Lulusan Perguruan Tinggi Di Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 12(06), 387–397.
- Ashari, F., & Siwi, M. K. (2022). Pengaruh Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 1989-2019. *Salingka Nagari*, 01(2), 315–329.
- Batubara, M. Y., Hartini, S., & Sari Siregar, E. (2018). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Kota Padangsidempuan. *Education and Development*, 6(2), 41–49.
- Damanik, D., & Saragih, M. (2023). Korupsi, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 71–81. <https://doi.org/10.36985/xer56415>
- Febriana, I. S., & Praptoyo, S. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(9), 1–22.
- Hasnah, N. M., & Aisyah, S. (2025). The Effect Of The Global Economic Environment On National Economic Growth In Indonesia 1995-2023. *Management Studies and*

Entrepreneurship Journal, 6(3), 2130–2140.
<https://doi.org/10.37385/msej.v6i3.7606>

- Hazmi, R. A. Al. (2024). Pengaruh Kemiskinan Dan Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnalku*, 4(1), 1–10.
- Klein, M. (2015). The increasing unemployment gap between the low and high educated in West Germany. Structural or cyclical crowding-out? *Social Science Research*, 50, 110–125. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2014.11.010>
- Lim, L. (2003). Corruption, Southeast Asian Style: Its Puzzling Connections with Economic Growth and Democracy. *Journal of the International Institute*, 10(2), 1–5. <http://hdl.handle.net/2027/spo.4750978.0010.206>
- Liu, F., & Shuwen, Z. (2022). Nexus Among Corruption, Political Instability And Natural Resources On Economic Recovery In Vietnam. <https://ssrn.com/abstract=4273595>
- Martkiana, A. R., & Hariani, S. (2024). Evaluasi Kontribusi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 34 Provinsi Indonesia (2018-2022). *JURNAL ECONOMIA*, 3(9), 1048–1063.
- Maulana, R., & Bowo, P. A. (2013). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI TERHADAP IPM PROVINSI DI INDONESIA 2007-2011. *Journal of Economics and Policy*, 6(2), 103–213. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>
- Nugroho, A. P., & Aisyah, S. (2022). PENGARUH KEBIJAKAN MONETER DAN FLUKTUASI HARGA KOMODITAS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2011-2021. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(10), 1–17. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.10970>
- Nur Rahmawati, A., Lathifah, N., Ekonomi, I., Sunan Ampel Surabaya, U., Timur, J., & Email, I. (2024). Isoquant: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Pengaruh SiLPA, Pajak Daerah, dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, 8(1), 79–94. <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/isoquant>
- Khotiawan, M., Sakti, R. K., & Wahyudi, S. (2023). An Analysis of the Effects of Spatial Dependence on Economic Growth Among Regencies and Cities in Java. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 24(2), 202–220. <https://doi.org/10.23917/jep.v24i1.22109> Jurnal
- Ofori, P. E., Ofori, I. K., & Asongu, S. A. (2022). Towards efforts to enhance tax revenue mobilisation in Africa: Exploring the interaction between industrialisation and digital infrastructure. In *Telematics and Informatics* (Vol. 72). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2022.101857>

- Pratama, R. A., & Widyastuti, S. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Veteran Economics, Management & Accounting Review*, 1(1), 104–120. <https://doi.org/10.59664/vemar.v1i1.4832>
- Rahmawati, A. N., & Lathifah, N. (2024). Pengaruh SiLPA, Pajak Daerah, dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 79–94. <https://doi.org/10.24269/iso.v8i1.2632>
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(1), 17–27. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i1.103>
- Searle, D. (2023). The effect of formalising worker involvement in the risk assessment process on the accident rate within UK higher education. *Social Sciences and Humanities Open*, 8(1). <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100572>
- Setiawati, E., & Al Qoodir, W. (2021). Pengaruh Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomika : Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 214–243. <https://doi.org/10.24903/je.v10i2.1428>
- Setyanti, A. M., & Finuliyah, F. (2022). Pengangguran Terdidik Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Pada Data Sakernas 2020. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(1). <https://doi.org/10.47198/naker.v17i1.118>
- Setyowati Eni. (2001). Teknologi Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 161–173.
- Simamora, S. (2014). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap belanja daerah: dalam prespektif teoritis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(2), 258–271.
- Sugiarthi, N., & Supadmi, N. (2014). Pengaruh Pad, Dau, Dan Silpa Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 7(2), 477–495.
- Zhou, X., Cai, Z., Tan, K. H., Zhang, L., Du, J., & Song, M. (2021). Technological innovation and structural change for economic development in China as an emerging market. *Technological Forecasting and Social Change*, 167. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120671>